

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Pada dasarnya, perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat namun hampir 70 % kerusakan alam di Indonesia disebutkan banyak aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas industri pertambangan. Banyak kritik yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintah, LSM dan juga pakar pendidikan maupun pakar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengenai praktik bisnis yang dijalankan perusahaan contohnya kerusakan alam dan lingkungan sekitar daerah pertambangan.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga telah mendapat sorotan dari pemerintah, diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pengungkapan CSR mengacu pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI) yang berlaku secara internasional. Sejak 2003 terdapat kesepakatan dikalangan pakar maupun praktisi bahwa standar laporan GRI adalah standar laporan yang dianggap paling komprehensif. Pengungkapan CSR tersebut seluruhnya berjumlah 91 item pengungkapan berdasarkan GRI yang terdiri dari indikator ekonomi 9 item, lingkungan 34 item, tenaga kerja 16 item, hak asasi manusia 12 item, sosial 11 item dan produk 9 item [1].

Perusahaan besar dengan tingkat organisasi yang kompleks akan menyebabkan kompleksitas akuntansi yang tinggi pula. Kondisi ini berpotensi untuk menciptakan konflik keagenan dan menyebabkan adanya asimetri informasi. Namun semakin tinggi kompleksitas akuntansi yang disebabkan karena banyaknya jumlah anak perusahaan, akan mengurangi kecenderungan manajer yang melakukan manajemen laba untuk meningkatkan pengungkapan kegiatan CSR. Hal ini disebabkan karena dengan kompleksitas akuntansi yang semakin tinggi tersebut juga membuat manajer yakin bahwa tindakan manajemen labanya tidak bisa dideteksi oleh *stakeholder* [2].

Belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (*coporate social responsibility*) dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan menjalankannya. Hal ini dapat dilihat dari anggota yang

bergabung dalam *Corporate Forum for Community Development* (CFCD) baru sebanyak 253 perusahaan, padahal kalau melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program CSR. Padahal untuk menjalankan program CSR sebenarnya tidak sulit hanya membutuhkan 1 persen dari net profit [3]

Pertambangan batubara saat ini, yang menimbulkan dampak lingkungan akibat pencemaran lingkungan, sebagai contoh yang dilakukan PT. Nuansa Coal Investment telah, dalam kasus pencemaran lingkungan disekitar warga. *Settling pond* belum memadai, sehingga pengelolaan limbah mencemari sumur warga. Kerugian yang ditimbulkan akibat pertambangan batubara, dalam hal ini pertanggung jawaban kepada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan [4] .

Kasus PT. Freeport Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh *multinational corporation* telah menimbulkan konflik panjang dengan masyarakat sekitar. Ini terjadi karena masyarakat sekitar tidak merasa mendapatkan keuntungan dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia. Realita ini semakin terlihat dengan masih banyaknya masyarakat Papua yang sampai saat ini berada dalam keadaan miskin, dan penyakit yang disebabkan oleh kelaparan. Sementara eksplorasi tambang yang dilakukan telah membuat PT. Freeport memperoleh banyak sekali keuntungan. Walau dana CSR memang disediakan akan tetapi jumlahnya dianggap sedikit dan belum mencukupi sebagaimana layaknya untuk ukuran perusahaan multinasional seperti PT. Freeport Indonesia.

Kasus ini juga terjadi di Minahasa, bahwa PT. Newmont Minahasa Raya dengan pencemaran limbah yang dilakukan telah menimbulkan efek pada kesehatan masyarakat. Dan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat tersentuh air limbah pencemaran tersebut sampai saat ini belum mendapat kompensasi pergantian biaya secara wajar. Dan jumlah masyarakat dianggap tidak sedikit, namun banyak [5].

Beberapa faktor yang mempengaruhi CSR antara lain *Good corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit), kualitas audit, kinerja keuangan, dan manajemen laba.

Salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan

asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan. Pertumbuhan yang dominan dari kepemilikan institusional di pasar modal mencerminkan konsentrasi dan kenaikan kekayaan oleh investor institusional [6]. Sehingga keputusan investor institusional dalam pasar modal berdampak pada nilai saham perusahaan. Investor institusional melihat keuntungan jangka panjang dari keterlibatan perusahaan dalam *corporate social performance*. Hasil penelitian kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [7]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [8].

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan [9]. Komisaris independen akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktek dan pengungkapan CSR karena semakin besar jumlah komisaris independen maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Keberadaan dewan komisaris independen akan semakin menambah efektifitas pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [10]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [11].

Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas proses perusahaan dalam memproduksi data finansial dan kontrol internal, eksistensi komite audit terletak

pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya. Eksistensi dari komite audit dengan proporsi yang tinggi pada proporsi direktur independen akan meningkatkan kontrol internal yang akan berpengaruh pada kualitas terbaik dari suatu pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [12]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang menunjukkan Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [11].

Saat ini, tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan. Laporan tersebut menjadi alat *public relation* perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Dan hingga kini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR [13]. Kualitas audit sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pihak eksternal akan laporan keuangan suatu perusahaan termasuk investor. Sehingga semakin tinggi kualitas audit maka akan meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pelaporan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [14]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [8].

Untuk dapat mengoptimalkan nilai perusahaan dibutuhkan kinerja keuangan yang efisien dan efektif. Kinerja keuangan adalah salah satu tolak ukur yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan tersebut. Penilaian atas kinerja keuangan setiap perusahaan dapat

dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Penilaian kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset (ROA)* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Dengan profitabilitas yang tinggi, akan memberikan kesempatan yang lebih kepada manajemen dalam mengungkapkan serta melakukan program CSR. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan informasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan (ROA) tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [15]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan (ROA) berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [16].

Salah satu cara yang sering digunakan untuk menyesatkan pemilik perusahaan adalah dengan melakukan manajemen laba [17]. Manajemen laba adalah tindakan yang terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi-transaksi untuk merubah laporan keuangan yang menyesatkan terhadap *stakeholders* atas dasar kinerja ekonomi organisasi atau untuk mempengaruhi hasil sesuai dengan kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Konsekuensi bila manajer melakukan manajemen laba adalah manajer dapat kehilangan reputasi, pekerjaan, dan karirnya. Sedangkan konsekuensi bagi perusahaan adalah adanya ancaman tindakan yang tidak menyenangkan dari karyawan, kesalahpahaman dari pelanggan, tekanan dari investor, pemutusan hubungan dari rekan kerja perusahaan, tuntutan hukum dari aparat, boikot dari aktivis, pandangan sinis dari masyarakat, dan pengungkapan dari media yang pada akhirnya akan menghancurkan reputasi perusahaan [18]. Untuk menghindari kecurigaan dari *stakeholder*, manajer membuat suatu kebijakan untuk ditunjukkan kepada *stakeholder* melalui praktek *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* berkaitan dengan pertanggung jawaban moral yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan [19]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [20]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* [21].

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015”

### 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *good corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit), kualitas audit, kinerja keuangan, dan manajemen laba berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 ?

### 1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Variabel Dependen : *Corporate Social Responsibility*
- b. Variabel Independen :
  1. *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Kepemilikan Intitusional, komisaris independen dan komite audit.
  2. Kualitas Audit yang diproksikan dengan ukuran KAP ( Kantor Akuntan Publik )
  3. Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas (*Return On Asset*)
  4. Manajemen Laba
- c. Objek Penelitian : Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
- d. Periode Pengamatan : Periode 2012-2015

### 1.4. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris

independen dan komite audit), kualitas audit, kinerja keuangan, dan manajemen laba berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.

### 1.5. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

#### 1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami penerapan prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan untuk evaluasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi perusahaan dalam menyusun, mengatur *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan.

#### 2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan mana yang dapat menjadi sasaran investasi.

#### 3. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya dengan penelitian yang sama

### 1.6. Originalitas penelitian

Penelitian ini adalah hasil replikasi dari penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)” [8]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel Struktur Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel kinerja keuangan karena dengan profitabilitas yang tinggi, akan memberikan kesempatan yang lebih kepada manajemen dalam mengungkapkan serta melakukan program CSR. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan informasi sosial [15], komisaris independen karena Komisaris independen akan

menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktek dan pengungkapan CSR karena semakin besar jumlah komisaris independen maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif [9], Eksistensi dari komite audit dengan proporsi yang tinggi pada proporsi direktur independen akan meningkatkan kontrol internal yang akan berpengaruh pada kualitas terbaik dari suatu pengungkapan *corporate social responsibility* [12], Untuk menghindari kecurigaan dari *stakeholder*, manajer membuat suatu kebijakan untuk ditunjukkan kepada *stakeholder* melalui praktek *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* berkaitan dengan pertanggung jawaban moral yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan [19]

2. Objek yang digunakan pada peneliti terdahulu adalah perusahaan manufaktur sedangkan objek pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan.
3. Periode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah tahun 2009 sedangkan pada penelitian ini dari tahun 2012-2015.

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL